RENJA
RENCANA KERJA

2025

RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM

rsjdahm.kaltimprov.go.id
(0541) 743364
Rsjdahm@gmail.com
Jl. Kakap, Sungai Dama

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

(1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
BAB I. Pendahuluan;
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V. Penutup.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dinas Kesehatan;
c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Sosial;
j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
m. Dinas Lingkungan Hidup;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
u. Dinas Pariwisata;
v. Dinas Perkebunan;
w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
x. Dinas Kehutanan;
y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
aa. Sekretariat Daerah;
bb. Sekretariat DPRD;
cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
dd. Badan Pendapatan Daerah;
ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
ff. Badan Kepegawaian Daerah;
gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
ii. Badan Penghubung Provinsi;
jj. Inspektorat;
kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur dapat menyelesaikan penyusunan RENJA (Rencana Kerja) RSJD Atma Husada Mahakam untuk tahun 2025.

RENJA (Rencana Kerja) tahun 2025 ini dibuat sebagai gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSJD Atma Husada Mahakam dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan kesehatan, terutama kesehatan jiwa di Provinsi kalimantan Timur dalam kurun waktu satu tahun kedepan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) RSJD Atma Husada Mahakam.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam Perubahan Renja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan RENJA (Rencana Kerja) ini, oleh karena itu masukan serta saran yang membangun kami harapkan dalam rangka perbaikan pembuatan Renja di tahun-tahun berikutnya.

Samarinda, 2025
Direktur RSJD Atma Husada Mahakam
Provinsi Kalimantan Timur

dr. Indah Puspitasari, MARS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670530 199803 2 003

DAFTAR ISI

Hal.

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 9

1.3 Maksud dan Tujuan 12

1.4 Sistematika Penulisan 13

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU... 14

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.....
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 37

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD 41

2.4 Review Terhadap Rencana RKPD 57

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 66

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....71

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 71

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 75

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR..... 77

4.1 Program dan Kegiatan 77

BAB V PENUTUP 90

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja 2025 90

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 90

5.3 Rencana Tindak Lanjut 91

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur 31

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur 40

Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RENJA RKPD ..... TAHUN 2025 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR..... 58

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur..... 67

Tabel 2.5 Rumusan Rencana Kerja Program ..... dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026..... 84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDG)* yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukan ada 27,3 juta orang di indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk. diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.1 Pengertian Ringkas Tentang Renja Perangkat Daerah

Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajib kan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Rencana Kerja Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja RKPD Provinsi Kalimantan TImur. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur.

Mengingat arti strategis Rencana Kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi;

   Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja RKPD Provinsi Kalimantan TImur. Oleh karena itu penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada

Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur.

Penyusunan Rencana Kerja ini telah memperhatikan berbagai ketersediaan sumber daya yang ada, sehingga dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan, Rumah Sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam berupaya seoptimal mungkin memberikan fasilitas pelayanan yang terbaik sesuai kapasitas dan fungsinya.

1.1.4 Keterkaitan Antara Renja Dengan Renstra Perangkat Daerah

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kedudukan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dengan dokumen perencanaan ditingkat atas. Renja perangkat daerah disusun oleh pimpinan sebagai acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya untuk mendukung pencapaian target-target kinerja didalam Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan akan bermuara dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah sebagai dokumen turunan dari RKPD.

Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2026 guna memberikan arah, kebijakan dan strategi yang hendak ditempunya selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.1.5 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Dengan Renja K/L

Perangkat Daerah mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL:

1. Daftar alokasi anggaran masing-masing unit eselon I yang dirinci per Perangkat Daerah dan sumber dananya berdasarkan Pagu Sementara yang ditandatangani oleh pejabat eselon I;
2. Peraturan perundangan mengenai struktur organisasi dan tugas fungsinya;
3. Standar Biaya;

Tugas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan RKA-KL adalah menyusun Kertas Kerja RKA Perangkat Daerah yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengetahui Dasar Alokasi Anggaran Satker
2. Berdasarkan Daftar alokasi anggaran per Satker dan sumber dana, satker menyusun Rencana Kerja dan anggarannya. Dasar alokasi anggaran tersebut berguna sebagai kontrol batas tertinggi alokasi anggaran satker pada akhir penyusunan KK RKA-KL.
3. Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta output kegiatan yang dihasilkan (sesuai karakteristik satker). Jenis kegiatan

yang akan dilaksanakan terdiri dari kegiatan generik atau teknis;

4. Peruntukan alokasi anggaran sesuai dengan prioritas sebagaimana diuraikan sebelumnya;
5. Mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui penggunaan komponen input/rincian biaya dalam rangka pencapaian output kegiatan dengan memanfaatkan penyediaan / penyajian makanan dan snak berbasis pangan lokal non beras, non terigu, sayuran dan buah sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah;
6. Komponen input dalam rangka pencapaian output kegiatan yang dibatasi dalam hal Iklan layanan masyarakat kecuali untuk :
   a. Iklan yang mengajak/mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kebijakan Pemerintah. Contohnya, iklan mengenai: cara penanggulangan suatu penyakit menular, mendukung keberhasilan program pendidikan sembilan tahun, ajakan untuk bayar pajak; dan
   b. Tetap mempertimbangkan bahwa manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.

      Untuk biaya masukan/keluaran yang belum tercantum dalam PMK tentang Standar Biaya maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertanggung jawab atas suatu kegiatan wajib membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan bahwa PA/KPA bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan RKA-KL

diluar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

7. Pelaksanaan Pencapaian Output Kegiatan

   Perincian biaya Komponen Input dalam KK RKA-KL meliputi penyajian informasi item-item biaya yang akan dibelanjakan dalam rangka pencapaian output suatu kegiatan. Penyajian informasi dimaksud terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan (secara swakelola atau kontraktual). Langkah penyajian informasi tersebut sebagai berikut:

   a. Swakelola

      1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci menurut jenis belanja yang sesuai. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik dan menggunakan jenis Belanja Barang. Contoh Kegiatan Diklat Teknis PNS.

      2) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik dan menggunakan jenis belanja Bantuan Sosial dan Belanja Barang. Contoh Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

   b. Kontraktual.

      Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara kontraktual dimasukkan pada satu jenis belanja yang sesuai

8. Informasi Pengadaan Barang dan Jasa K/L Melalui Proses Pelelangan Sebagai bentuk transparansi kegiatan pemerintahan, K/L diharapkan memberi informasi mengenai rencana pengadaaan barang dan jasa melalui proses pelelangan. Kriteria pengadaan barang dan jasa melalui kontraktual yang perlu diinformasikan meliputi: nilai pengadaan barang dan jasa di atas 100 juta; dan rencana

waktu pelaksanaan pengadaannya. Informasi tersebut dicantumkan pada saat penyusunan RKA-KL.

Penyusunan RKA-KL untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh satker BLU, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU. Dalam rangka penyusunan anggaran satker BLU agar memperhatikan hal–hal sebagai berikut :

1. Satker BLU menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada strategi bisnis;
2. RBA BLU memuat seluruh program, kegiatan, anggaran penerimaan/pendapatan, anggaran pengeluaran/belanja, estimasi saldo awal dan estimasi saldo akhir kas BLU;
3. RBA disusun berdasarkan :
   a. Basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya; dan
   b. Kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat.
4. Satker BLU yang telah mampu menyusun standar biaya menurut jenis layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya maka penyusunan RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut, sedangkan untuk satker BLU yang belum mampu menyusun standar biaya, RBA disusun berdasarkan SBU;
5. Pagu dana pada ikhtisar RBA pada komponen PNBP dan Rupiah Murni (RM) harus sama dengan alokasi anggaran pada pagu sementara.

1.1.6 Keterkaitan Antara Rencana Kerja Renja Dengan Renja Kabupaten/Kota

RSJD Atma Husada Mahakam adalah Rumah Sakit Khusus Provinsi Kalimantan Timur sebagai Organisasi Bersifat

Khusus (OBK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perngkat Daerah, dimana pada saat penyusunan Renja walaupun tidak memiliki UPTD tetapi tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, termasuk masyarakat di beberapa Kabupaten pada Provinsi Kalimantan Timur. Contohnya untuk masyarakat yang berada pada daerah yang jangkauan aksesnya sangat jauh dari RSJD Atma Husada Mahakam, untuk pelayanan rawat jalan terkait obat-obatan akan menyesuaiakan dengan kebutuhan pasien dan jarak akses sehingga perawatan di rumah tetap dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dengan demikian persedian Obat-obatan juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasien.

1.1.7 Tindak Lanjutnya dengan Proses Penyusunan RAPBD

Penyusunan Rencana Kerja Renja RSJD Atma Husada Mahakam dimulai dari tahapan persiapan, penyusunan Rancanan Renja, Penyusunan Renja, Penyusunan Renja, dan Penetapan Renja RSJD Atma Husada Mahakam. Mekanisme dan waktu penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam bersinergi dengan penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur, karena pada dasarnya RKPD Provinsi Kalimantan Timur merupakan rangkuman dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang dikolaborasikan menjadi dokumen perencanaan tahunan daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman kepada peraturan yang berlaku antara lain :

1.2.1 Undang-undang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

1.2.2 Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara No. 4817);
3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahanan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

1.2.3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

1.2.4 Peraturan Lainnya tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1. Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2011 tentang Perubahan PERDA No 10 Tahun 2008 tentang SOTK RSJD Atma Husada Mahakam Prov Kal-Tim;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Rumah Sakit Jiwa daerah Atma Husada Mahakam;
4. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 188.44/K.620/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah. dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tiur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya

pelaksanaan program dan kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan di RSJD Atma Husada mahakam.

2. Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan Organisasi.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rencana RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
- 4.1 Program dan Kegiatan

BAB V. PENUTUP
- 5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja 2025
- 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun anggaran 2023 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) murni sebesar Rp. 81.721.596.342.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan anggaran maka pada tahun 2023 RSJD Atma Husada Mahakam mendapatkan penambahan anggaran melalui mekanisme perubahan APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 97.219.696.714 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 82.709.288.464 Dan Belanja Modal Rp. 14.510.408.250.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan Belanja Operasi sebesar Rp. 76.663.424.030 (92,69%) dan belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp. 14.033.501.219 (96,71%) sehingga total realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 90.696.925.249 (93,29%).

Pelaksanaan untuk program-program Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur Tahun 2023 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

- Tidak ada Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target semua target yang direncanakan dapat tercapai selama tahun 2023.

2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

❖ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja**

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang baik dan Indikator kegiatan ini adalah "Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebanyak 3 laporan dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 3 laporan, dengan capaian sebesar 100 %. Laporan dimaksud adalah meliputi (Laporan Perjalanan Dinas Evaluasi Sakip, Laporan Perjalanan Dinas Evaluasi Renja, Laporan Perjalanan Dinas LKJIP).
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.784.480 atau 97,75 %.
- Sub kegiatan yang menunjang keberhasila Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sasaran Terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel dan indikatornya adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 3 laporan, dengan target sebanyak 3 laporan, dengan capaian sebesar 100 %. Laporan dimaksud adalah meliputi (Laporan Lakip, Laporan evaluasi renja, Laporan evaluasi sakip)

- Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.784.480 atau 97,75 %.

❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah Terlaksananya penatausahaan Keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan Indikator kegiatan ini adalah "Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, dengan capaian sebesar 100 %. Capaian Penyediaan Gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu adalah penyediaan gaji untuk pegawai dan penatausahaan keuangan pada RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2023 selalu tepat waktu penyelesaian dan pembayarannya.
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.894.970.247 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.253.869.602 atau 90,39 %.
- Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sasaran Terlaksananya pembayaran keuangan serta laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan indikatornya adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 234 orang/bulan, dengan target sebanyak 234 orang/bulan, dengan capaian sebesar 100 %.
- Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.641.290.247 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.018.357.791 atau 90,38 %.
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan sasaran Terlaksananya penatausahaan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan indikatornya adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 12 dokumen, dengan target sebanyak 12 dokumen, dengan capaian sebesar 100 %.
- Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 197.280.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 179.900.000 atau 91,19 %.
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP Untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan sasaran Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan dan indikatornya adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 10 dokumen, dengan target sebanyak 10 dokumen, dengan capaian sebesar 100 %.
- Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 56.400.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.611.811 atau 98,6 %.

❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah Optimalnya Administrasi Umum yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan Indikator kegiatan ini adalah "cakupan pelayanan administrasi perkantoran", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100 %. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran didapat dari perhitungan jumlah realisasi seluruh target sub kegiatan dibagi seluruh target sub kegiatan dikali 100%
- Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.011.425.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 969.920.270 atau 95,9 %. Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran Tersedianya bahan/barang/peralatan rumah tangga dan peralatan kantor rumah sakit dan indikatornya adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 24 paket, dengan target sebanyak 24 paket, dengan capaian sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 105.582.400 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.179.273 atau 97,72 %.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan indikatornya adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 21 paket, dengan target sebanyak 21 paket, dengan capaian sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 797.871.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 764.745.617 atau 95,85 %.
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan sasaran tersedianya paket peralatan rumah tangga sesuai kebutuhan rumah sakit dan indikatornya adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 23 paket, dengan target sebanyak 23 paket, dengan capaian sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 107.971.500 dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 101.995.380 atau 94,47 %.

- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sasaran untuk kegiatan ini adalah Optimalnya Pengadaan Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam dan Indikator kegiatan ini adalah "Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan (Jumlah Pengadaan/Perencanaan x 100 persen)", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, dengan capaian sebesar 100 %. Capaian Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan Jumlah Pengadaan yang dilakukan pada tahun 2023 dibagi dengan Perencanaan yang sudah ditetapkan pada tahun 2023 dikalikan 100 persen. Hal ini berarti bahwa seluruh perencanaan pengadaan yang telah direncanakan di dalam DPA telah dilaksanakan secara keseluruhannya.
  - Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.191.306.725 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.160.352.413 atau 97,4 %. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan yaitu :
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan sasaran Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan dan indikatornya adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 127 unit,

dengan target sebanyak 127 unit, dengan capaian sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.191.306.725 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.160.352.413 atau 97,4%.

❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah "Terlaksananya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Pada RSJD Atma Husada Mahakam" dan Indikator kegiatan ini adalah "Nilai Survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi 77.2 % dari target yang ditetapkan yaitu 78 %, dengan capaian sebesar 98,97%. Survey kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja merupakan sub bagian dari survei kepuasan pegawai yang dilakukan setiap tahun oleh RSJD Atma Husada Mahakam yang selama ini bekerja sama dengan FKM Universitas Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 15.757.353.960 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.569.405.716 atau 92,46 %. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran terlaksananya penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit dan indikatornya adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan. Realisasi

kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 12 laporan, dengan target sebanyak 12 laporan, dengan capaian sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.017.624.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.582.556.511 atau 78,44%.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dicapai dengan melakukan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sasaran tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan rumah sakit dan indikatornya adalah Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 12 laporan, dengan target sebanyak 12 laporan, dengan capaian sebesar 100 %. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 13.739.729.760 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.986.849.205 atau 94,52 %.

❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada RSJD Atma Husada Mahakam dan Indikator kegiatan ini adalah "Jumlah Gedung dan Sarana/Prasarana Yang Berfungsi Dengan Baik", untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebanyak 26 gedung dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 26 gedung, dengan capaian sebesar 100 %. Capaian pemeliharaan gedung dan sarana/prasarana seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar

Rp. 2.133.664.885 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.022.907.700 atau 94,81 %. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan yaitu:

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan sasaran Terlaksananya pemeliharaan /Rehabilitasi gedung dan sarana/ prasarana Rumah Sakit dan indikatornya adalah Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dilakukan pemeliharaan. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 2 gedung, dengan target sebanyak 2 gedung, dengan capaian sebesar 100 %. Adapun aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian sub kegiatan ini adalah berupa pemeliharaan gedung instalasi gizi dan gedung pelayanan. Rehabilitasi gedung gizi berupa perbaikan atap dan untuk gedung pelayanan adalah biaya perencanaan teknis tidak sederhana yang rencananya untuk kegiatan fisiknya untuk gedung pelayanan akan dilaksanakan pada tahun 2024. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.133.664.885 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.022.907.700 atau 94,81 %.

❖ Peningkatan pelayanan BLUD

- Sasaran untuk kegiatan ini adalah ”Meningkatnya pelayanan BLUD” dan Indikator kegiatan ini adalah “Persentase Pendapatan terhadap target”, untuk capaian

indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian sebesar 100 %. Capaian Persentase Pendapatan terhadap target didapatkan dengan membandingkan pendapatan BLUD dengan target pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 27.175.750.372 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.087.758.220 atau 96%. Kegiatan "Peningkatan pelayanan BLUD" dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan yaitu:

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Untuk Kegiatan "Peningkatan pelayanan BLUD" dicapai dengan melakukan satu sub kegiatan yaitu "Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD" dengan sasaran "Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan rumah sakit" dan indikatornya adalah "Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan". Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebanyak 25 unit kerja, dengan target sebanyak 25 unit kerja, dengan capaian sebesar 100 %. Adapun aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian sub indikator ini adalah dengan menyediakan kebutuhan terkait operasi yang terdiri dari kebutuhan pegawai dan barang jasa, dan terkait kebutuhan belanja modal yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam rangka memenuhi kebutuhan unit kerja yaitu sebanyak 25 unit kerja.

❖ Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi

- Sasaran Meningkatnya mutu dan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Indikator

kegiatan ini adalah “jumlah laporan bimtek yang dilaksanakan”, untuk capaian indikator ini di tahun 2023 terealisasi sebanyak 5 laporan dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5 laporan, dengan capaian sebesar 100 %. Laporan dimaksud adalah meliputi (Keperawatan, Medis, Penunjang Medis, Pelayanan Medis, Administrasi). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 439.247.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 419.781.890 atau 95,57%.

- Sub kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan pada RSJD Atma Husada Mahakam dan indikatornya adalah Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat. Realisasi kinerja untuk sub kegiatan ini adalah sebesar 63 orang, dengan target sebanyak 63 orang, dengan capaian sebesar 100 %.

❖ Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Kegiatan ini mempunyai sasaran kegiatan Optimalnya kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan indikator Persentase capaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa dengan target 100% yang dilakukan pada tahun 2023 dengan target sebanyak 2 laporan yaitu laporan kegiatan porkesremen dan home visite. Dalam pelaksanaan kegiatan Porkesremen ini RSJD Atma Husada Mahakam mengikuti acara yang diadakan di Lombok dengan melibatkan pasien dan pegawai RSJD Atma Husada Mahakam.

- Sub Kegiatan “Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)”. Sub kegiatan ini mempunyai sasaran yaitu Optimalnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa. Untuk melaksanakan Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2023 telah dianggarkan dalam DPA sebesar Rp. 371.494.800 lebih tinggi jika dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 168.365.000 Demikian pula dengan realisasi tahun 2023 lebih besar bila dibanding dengan realisasi anggaran tahun 2022 yaitu sebesar 98,82 % atau senilai Rp. 367.127.530 untuk tahun 2023, sedangkan untuk realisasi tahun 2022 sebesar 92,89 % atau senilai Rp. 156.388.788.

❖ Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang dilakukan pada tahun 2023 dengan indikator Nilai Aspak (Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan) merupakan aplikasi dari kementerian yang memberikan informasi tentang Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang ada di Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Anggaran tahun 2023 pada kegiatan ini terjadi penurunan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, yaitu sebesar Rp.11.190.483.325, dan realisasi sebesar Rp. 10.793.017.428 dengan capaian 96.45 % sedangkan

anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.18.893.432.700, realisasinya Rp. 18.344.542.349 dengan capaian 97,09 %.

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik, dan telah terealisasi sebanyak 87 Unit dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target yang direncanakan sebanyak 87 Unit dengan realisasi anggaran Rp. 10.152.605.024 atau terserap sebesar 97,23%. Alat kesehat tersebut terdiri dari empat unit yaitu : masker medis n95, gelang pasien/id band pasien, handscoon-sarung tangan medis, fingertip pulse oximeter, fingertip pulse oximeter, penlight, reflex hammer, stetoskop dewasa, vacuette tourniquet, masker, timbangan duduk, celemek / apron, kacamata (google), sarung tangan, thermometer digital, alat praktek kedokteran atau manikin, cabinet dry box, plasma sterilizer, radiation surveymeter, emergency stretcher-brankar emergency, tensimeter aneroid, tensimeter digital, timbangan berat+tinggi badan digital, nebulizer, EMG with ultrasound, electrocardiogram ecg, PACS (Picture Archiving and Communications System), kursi roda, hematologi analyzer, urine analyzer, blender obat, Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR), mesin instalasi pengolah air limbah (ipal), dishwasher.
- Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit mempunyai sasaran yaitu Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit. Aktivitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah berupa Pengadaan (pengisian) tabung gas, pengadaan ac, belanja Barang pakai habis, pengadaan mebeler, pengadaan rak server, pengadaan sofa, dan lain - lain Target kinerja sub

kegiatan ini secara keseluruhan ditetapkan sebanyak 400 Unit dan terealisasi sebanyak 400 Unit dengan capaian sebesar 100%.Anggaran pada sub kegiatan ini sesuai dengan DPA perubahan 2023 adalah sebesar Rp. 550.647.813 dengan realisasi sebesar Rp. 500.233.135 atau 90,84 %

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan mempunyai sasaran kegiatan yaitu Tersedianya dan Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan dan sarana prasarana Kesehatan sesuai standar. Aktivitas yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah berupa pemeliharaan alat kesehatan dengan target yang ditetapkan sebanyak 345 Unit dan terealisasi sebanyak 345 Unit dengan capaian sebesar 100%. Anggaran pada sub kegiatan ini sesuai dengan DPA perubahan 2023 adalah sebesar Rp. 198.061.200 dengan realisasi sebesar Rp. 140.179.269 dengan capaian sebesar 70,78 %.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

❖ Pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat" dimana program ini mempunyai sasaran program yaitu meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan jiwa pada RSJD Atma Husada Mahakam dengan indikator persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan. Pada indikator ini realisasinya adalah sebesar 98,52% dari target 92% yang telah ditetapkan, dengan capaian kinerja sebesar 107,09%.

- ❖ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan" dengan kegiatan "Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi" Program ini mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan Pada RSJD AHM", dengan indikator "Persentase SDM terlatih ≥ 20 Jam Per Tahun" capaian di tahun 2023 realisasinya sebesar 87.17% dari target sebesar 86% dengan capaian sebesar 101,36 %. Dengan anggaran sebesar Rp. 439.247.000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 419.781.890 atau dengan capaian realisasi anggaran sebesar 95,57%
- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi". Program ini mempunyai sasaran yaitu "Terwujudnya tata kelola manajemen pelayanan rumah sakit yang baik", dengan indikator "Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan bidang kesehatan (Hasil dari Survei dari Pihak ketiga)" capaian di tahun 2023 realisasinya sebesar 89.81% dari target sebesar 86% dengan capaian sebesar 104,43 %. Dengan anggaran sebesar Rp.85.218.471.589 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 79.116.998.401 atau dengan capaian realisasi anggaran sebesar 92,84%.

2.1.4. Faktor-faktor Penyebab Tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerjaprogram / kegiatan :

Secara umum capaian sasaran kinerja RSJD Atma Husada Mahakam pada tahun 2023 telah dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan sebuah prestasi sebagai hasil kerja keras dari semua pihak yang berusaha konsisten untuk tetap fokus pada tujuan dan terget yang telah di tetapkan. Namun demikian dalam pencapaian

target yang telah ditetapkan masih menemui beberapa kendala yang dihadapai antara lain :

- Terbatasnnya anggaran untuk sub kegitan peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan, dimana pada sub kegiatan ini hanya menganggarkan kontribusi sebanyak 3 orang dan sisanya dibantu dengan dana BLUD.

RSJD Atma Husada Mahakam ProvinsiKalimantan TimurTahun 2024 merupakan tahun Pertama periode Renstra Tahun 2024-2026 yang melaksanakan 3 program, 11 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Gambaran hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 tersaji dalam table sebagai berikut:

TABEL 2.1 (T-C 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur

Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	02			**KESEHATAN**									
1	02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan Bidang Kesehatan (RS Atma Husada)	-		86,25 %	89.81 %	104.12 %		179.14	0
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	100 %	104.12 %			-	100 %	100 %	100 %

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	86 Indeks	-			-	82 Indeks	82	95.34
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Dalam Upaya PeningkatanKualitas Kinerja RSJD Atma Husada Mahakam	-	-	3	3	100		4	-
					Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	100	-	-	-	100 %	100 %	100 %

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Pegawai (RSJD AHM)	100 %	100 %	--	-	-	-	-	-
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	100 %	100 %	100 %		100 %	-
					Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	161 Dokumen	100 %	-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	7.45

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	-	100 %	78 %	77,2 %	98.97 %		77,2 %	-
					Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	78,6 %	98.97 %	-	-	-	78,2 %	78,2 %	99.49 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72,23 %	-	-	-	-	72,19 %	72,19 %	99.94 %
				Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD	100 %	-	100	100	100 %	100 %	100 %	100 %

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian nilai indikator mutu pelayanan	-	100 %	92 %	98,52 %	107.08 %		198.52 %	-
					Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)	93,83 %	107.08 %	-	-	-	93,73%	93,73%	99.89 %
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	95,2 %	-	85 %	92,15	108.41 %	94,8 %	281.45 %	295.64
				Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	-	108.41 %	100 %	100 %	100 %		100 %	-
					Angka Kunjungan Rawat Jalan	31845 Orang	100 %	-	-	-	26319 Orang	26319 Orang	82.64

				URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN(OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD SAMPAI TAHUN 2026)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU n-2 (2020)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
								TARGET RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N-2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1) 2024 TW 2	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM terlatih 20 jam pertahun	--	-	86,5 %	87,17 %	100.77 %	-	167.66 %	-
					Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinnya (RSJD Atma Husada Mahakam)	93,5 %	100.77 %	-	-	-	92,5 %	92,5 %	98.93
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Bimtek yang dilaksanakan	-	-	5 Bidang	5 Bidang	100 %		10 Bidang	-
					Jumlah laporan Diklat dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	85 %	100 %	-	-	-	86 Laporan	86 Laporan	101.17

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan peraturan tersebut Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam yang selanjutnya disingkat RSJD AHM adalah institusi pelayanan kesehatan jiwa perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta pelayanan pendidikan.Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSJD Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
4. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;

5. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
6. Rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medic dan keperawatan;
7. Rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penunjang dan pengembangan sumberdaya manusia serta peningkatan mutu;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
10. Melakukan pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap;
11. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

2.2.1. Kajian Terhadap Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun anggaran 2023 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) murni sebesar Rp. 81.721.596.342.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan anggaran maka pada tahun 2023 RSJD Atma Husada Mahakam mendapatkan penambahan anggaran melalui mekanisme perubahan APBD tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp. 97.219.696.714 dengan rincian Belanja Operasi Rp. 82.709.288.464 Dan Belanja Modal Rp. 14.510.408.250.

Adapun realisasi anggaran secara keseluruhan Belanja Operasi sebesar Rp. 76.663.424.030 (92,69%) dan belanja Modal secara keseluruhan sebesar Rp. 14.033.501.219 (96,71%) sehingga total realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 90.696.925.249 (93,29%). RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan Kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika. Serta zat adiktif lainnya (NAPZA) yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan sebagai OPD. Analisis Kinerja Pelayanan OPD tersebut merujuk pada **IKK (Indikator Kinerja kunci)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Secara Nasional RSJD Atma Husada Mahakam memiliki **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit yang harus dipenuhi yang terdiri dari 17 Pelaynan penilaian dimana indikator tersebut merupakan indikator Program RSJD Atma Husada Mahakam.

Secara lengkap rekapitulasi Analisis Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam disajikan dalam Tabel 2.2 (T-C.30) di bawah ini.

Tabel 2.2 (T-C 30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun N-2 (2023)	Tahun N-1 (2024)	Tahun N (2025)	Tahun N+1 (2026)	Tahun N-2 (2023)	Tahun N-1 (2024)	Tahun N (2025)	Tahun N+1 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)			-	93,73 %	93,78 %	93, 83 %	88 %	99,28 % (TW 2)	93,78 %	93, 83 %	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD

Tugas pokok RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur adalah Memberikan pelayanan kesehatan jiwa perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dan pemulihan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, RSJD Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan Paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
3. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
4. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
5. Perumusan, perencanaan pembinaan koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
6. Rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medic dan keperawatan;
7. Rumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penunjang dan pengembangan sumberdaya manusia serta peningkatan mutu;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
9. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

10. Melakukan pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain selain kekhususannya paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur rawat inap;
11. Melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama yang akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong.

Isu-isu strategis RSJD Atma Husada Mahakam antara lain:

1. Belum adanya regulasi secara khusus tentang kesehatan jiwa di Provinsi Kaltim.
2. Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.
3. Belum memadainya sistem informasi dan teknologi.
4. Belum optimalnya mutu layanan sesuai SPM.
5. Belum terakomodirnya kebutuhan pengembangan pelayanan dalam struktur organisasi.
6. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan.
7. Belum terpenuhinya standar jumlah dan kompetensi SDM.
8. Rendahnya accessibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan

Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa di RSJD Atma Husada Mahakam, maka organisasi perlu menetapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi secara tepat. Agar tujuan dan sasaran strategis dapat

dirumuskan secara tepat, diperlukan analisis lingkungan strategis baik yang sifatnya internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa permasalahan atau hambatan strategis yang telah diidentifikasi, sebagai berikut :

1. Permasalahan Internal :
    a. Belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA
    b. Prasarana Rumah Sakit yang belum terpenuhi sesuai ASPAK
    c. Implementasi pengembangan SIMRS kurang optimal karena terbatasnya SDM dan Anggaran
    d. Terbatasnya lahan RSJD Atma Husada Mahakam saat ini yang menyulitkan untuk dilakukan pengembangan layanan lainnya sesuai kebutuhan
    e. Standar Bangunan, Sarana dan Prasarana pada RSJD Atma Husada Mahakam belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit.
    f. RSJD Atma Husada Mahakam berada di lingkungan yang padat penduduk dimana telah beberapa kali terjadi musibah kebakaran yang mengancam bagi pelayanan dan keselamatan pasien
2. Permasalahan Eksternal :
    a. Kurangnya pengetahuan dan keperdulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK
    b. Kurangnya perhatian instansi-instansi terkait terhadap masalah ODGJ dan ODMK

2.3.2 Tujuan dan Sasaran RSJD Atma Husada Mahakam Tahun 2024-2026

Tujuan dan sasaran RSJD Atma Husada Mahakam mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 karena RSJD Atma Husada Mahakam adalah merupakan unsur dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan dan sasaran RSJD Atma Husada Mahakam mengacu dan mendukung tujuan yang pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yaitu “Mewujudkan SDM Berdaya Saing” dan sasaran yang kedua yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah Sakit khusus kelas A, tetapi belum menjadi Rumah Sakit pendidikan, meskipun saat ini Rumah sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam sudah melayani mahasiswa institusi pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan:

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis RSJD Atma Husada Mahakam berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1	:	Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
Sasaaran 1	:	Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel
Tujuan 2	:	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Sasaran 2	:	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Napza terpadu
Sasaran 3	:	Optimalnya Kualitas pelaksanaaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian

2.3.3 Dampaknya terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development Goals)

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia, PBB telah mencanangkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDGs yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Isu kesehatan jiwa merupakan salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia

menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukan ada 27,3 juta orang di indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk. Diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

2.3.4 Tantangan

Terdapat beberapa tantangan penting kedepan yang perlu diperhatikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam, antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan dan keperdulian keluarga terhadap anggota keluarganya yang mengalami ODMK.
2. Kurangnya perhatian Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi terhadap masalah kesehatan jiwa.
3. Stigma masyarakat terhadap Rumah Sakit Jiwa yang kurang baik.

2.3.5 Peluang

- Potensi prevalensi orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) meningkat.
- Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan jiwa dan napza yang berkualitas.
- Adanya peluang kerjasama dengan pihak lain (institusi pendidikan, RS, instansi terkait).
- Adanya perkembangan dari standar mutu dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan jiwa.

- Adanya komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota terhadap peningkatan dan pengembangan mutu layanan rumah sakit.
- Cepatnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi.

2.3.6 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindak Lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Dalam Tahun Yang Direncanakan.

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang mendasar dan terjadi di rumah sakit serta perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam. Beberapa masalah utama akan menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, disisi lain masalah utama tersebut akan memberikan dampak secara positif atau sebagai faktor pendorong. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sampai dengan saat ini meliputi beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)

Dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat padatnya penduduk terkhusus Pulau Jawa, Indonesia kini menanggulanginya dengan cara memindahkan Ibu kota Negara baru di luar Pulau Jawa, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alasannya adalah karena resiko bencana yang minim, kawasan tersebut juga dinilai cukup strategis diantara kota-kota yang berkembang, yakni kota Balikpapan dan Samarinda. Dalam

rencana pemindahan ibukota ini, diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur.

Pemerintah mengemukakan alasan utama dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa adalah pemerataan ekonomi. Aktivitas pemerintahan dan bisnis yang berpusat di Pulau Jawa khususnya DKI Jakarta, telah menghambat pertumbuhan pusat-pusat perekonomian baru di luar Pulau Jawa. Disisi lain ada beberapa resiko dari pemindahan IKN ke luar Pulau Jawa. Risiko terutama terkait dengan kesiapan daerah tujuan dalam aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Disisi lain, yang harus diperhatikan adalah penyebaran tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan proyek perpindahan IKN, yang menurut datanya 56% merupakan penduduk Pulau Jawa. Tenaga kerja yang berpindah ke wilayah IKN baru tentunya akan melakukan adaptasi atau penyesuaian dengan lingkungan baru, sosial budaya yang baru, dan karakteristik alam yang baru pula. Kondisi ini dapat menyebabkan munculnya gejala stres yang apabila berkelanjutan dan tidak mendapatkan penanganan yang cukup dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan mentalnya.

Selain itu dampak lain yang harus mendapat perhatian dan perlu diantisipasi adalah kebakaran hutan, banjir dan longsor merupakan bahaya yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam perencanaan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Adanya kekhawatiran mengenai potensi terpinggirnya masyarakat lokal menuntut adanya perencanaan yang lebih serius dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi dampak sosial apabila wacana pemindahan ibu kota negara benar-benar terwujud.

Kondisi tersebut dapat menjadi stressor bagi masyarakat lokal yang terdampak dan berisiko tinggi untuk mengalami ketegangan psikologis yang jika berkelanjutan dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dapat dirumuskan adalah Potensi meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak pemindahan IKN.

2. Tingkat Kemiskinan Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 -2026 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa tingkat kemiskinan Kaltim lebih baik dari Nasional akan tetapi terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Kutai Timur. Tren tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Kemiskinan sangat dekat dengan gangguan kesehatan mental. Bukan hanya stres dan depresi, kondisi ini juga bisa menyebabkan seseorang mengalami trauma dan gangguan cemas. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ketika kesehatan mental terjaga dengan baik, maka tubuh pun dapat akan berfungsi dengan baik. Selain itu, kesehatan mental yang optimal bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Ada berbagai hal yang bisa mengganggu kondisi kesehatan mental, mulai dari kondisi lingkungan hingga ekonomi dan ternyata ada berbagai dampak dari kemiskinan

pada kesehatan mental. seseorang yang mengalami kemiskinan berisiko dua kali lebih besar mengidap depresi dibandingkan mereka yang tidak mengalami masalah ekonomi. Hal ini terjadi karena kemiskinan dapat membebani kesehatan fisik maupun mental.

Tidak sedikit orang yang mengalami masalah ekonomi harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini bisa memicu tekanan pada mental sehingga orang tersebut mengalami stres. Tingkat stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu depresi yang mengganggu kesehatan mental seseorang. Dengan demikian dapat dirumuskan permasalah adalah meningkatnya angka gangguan jiwa sebagai dampak tingkat kemiskinan di Kaltim.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim

Sesuai data yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kegiatan rapat dengan agenda Kick Off Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 -2026 pada tanggal 5 Januari 2023 disampaikan bahwa IPM Kaltim berada diatas Nasional namun terdapat 3 kabupaten/kota dengan IPM terendah Kaltim yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Barat. Adapun tren IPM Kaltim sejak tahun 2018 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat

Sebagian besar ODGJ mengalami penurunan kesehatan secara fisik yang akhirnya menurunkan produktivitas, baik dalam bekerja maupun dalam beraktivitas sehari-hari. Secara keseluruhan gangguan Kesehatan Jiwa mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indonesia dan meningkatkan beban dana sosial untuk kesehatan masyarakat.

4. Aspek Sosial

Stigma dari masyarakat yang masih negatif terhadap masalah kesehatan jiwa memberikan dampak yang kurang baik untuk pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK. Masih banyaknya keluarga pasien yang kurang peduli terhadap ODMK dimana hal ini dapat dilihat dengan masih adanya pasien yang tidak dapat dipulangkan karena adanya penolakan keluarga dan masyarakat di tempat tinggal pasien atau pasien yang memang keberadaan keluarganya belum diketahui (pasien gelandangan psikotik).

Data pasien yang tidak dapat dipulangkan saat ini di RSJD Atma Husada Mahakam sebanyak 26 pasien. Selain itu juga masih adanya beberapa pasien yang dirawat di RSJD Atma Husada Mahakam yang tidak pernah dijenguk oleh keluarga walaupun keluarga bertempat tinggal di Samarinda.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan jiwa. Selain itu juga masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis penentuan isu-isu strategis di RSJD Atma Husada Mahakam, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu Tingginya stigma masyarakat terhadap ODMK.

5. Aspek Teknologi

Dalam lingkup kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi target nomor satu. Untuk itu kualitas pelayanan pada pasien selalu menjadi prioritas utama di berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, klinik kesehatan

maupun puskesmas. Dalam wilayah lingkup kesehatan ini, teknologi informasi kerap menjadi sorotan dan kini mengingat pentingnya peranan teknologi di segala segi kehidupan, maka teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien semakin digalakkan.

Teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien begitu penting. Salah satunya adalah teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi di rumah sakit bisa menghemat tempat maupun ruang lingkup pekerjaan para petugas medis. Petugas tidak perlu lagi mencatat di kertas/buku dan menyimpannya dalam bentuk dokumen offline. Dengan adanya sistem komputerisasi, maka data para pasien bisa tersimpan dengan aman di komputer.

Sistem komputerisasi di rumah sakit membuat pelayanan pada pasien menjadi lebih cepat. Petugas tidak perlu repot mencari data-data pasien satu-persatu dari buku atau dokumen tertulis lainnya, namun cukup membuka data pasien di komputer. Data yang dimaksud akan mudah dicari dengan cara mengetikkan keyword pada kolom pencarian maka data akan muncul secara otomatis. Data-data pasien juga lebih mudah ditelusuri atau dicek secara lebih terperinci sehingga meminimalisir human error. Petugas juga lebih mudah ketika perlu melakukan perubahan data pada pasien

Salah satu manfaat teknologi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan pasien adalah mempermudah komunikasi antar petugas medis. Petugas medis tidak perlu repot memberikan suatu dokumen milik pasien ke petugas lainnya ketika dokumen tersebut dibutuhkan namun para petugas cukup akses data di komputer. Kareena seluruh sistem informasi di rumah sakit bisa dilihat dan diakses oleh seluruh petugas medis kapan pun.

Rekam kesehatan elektronik merupakan dokumen yang sangat penting. Dokumen tersebut berisi tentang profil kesehatan pribadi milik pasien yang menggambarkan riwayat medis pasien serta catatan perkembangan kesehatan seumur hidup pasien. Termasuk di dalamnya adalah demografi pasien, permasalahan fisik dan psikis, imunisasi, data laboratorium, obat-obatan, tanda-tanda vital, laporan radiologi dan data lainnya.

RSJD Atma Husada Mahakam telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang mulai dibangun pada tahun 2017 dan terus dilakukan pengembangan/ updating sesuai dengan kebutuhan hingga saat ini. Permasalahan yang masih dirasakan terkait pemanfaatan teknologi informasi pada RSJD Atma Husada Mahakam adalah:

RSJD Atma Husada Mahakam telah membangun beberapa aplikasi untuk memudahkan proses pelayanan tetapi pemanfaatannya oleh masyarakat belum maksimal, misalnya rumah sakit telah membuat sistem pendaftaran secara online tetapi masyarakat belum memanfaatkan sistem tersebut walaupun telah dilakukan sosialisasi.

Kondisi SIMRS saat ini masih perlu dilakukan updating terhadap fitur-fitur di dalamnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih optimal baik oleh petugas rumah sakit maupun konsumen dari masyarakat. Salah satunya adalah dengan mentransformasi dokumen rekam medik menjadi dokumen digital dan lain-lain

Untuk kondisi ini permasalah yang dapat dirumuskan adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di RSJD Atma Husada

Mahakam oleh petugas maupun masyarakat sebagai konsumen.

6. Aspek Budaya Kerja

Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual. Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi. Budaya organisasi itu sendiri merupakan sistem nilai yang mengandung cita-cita organisasi sebagai sistem internal dan sistem eksternal sosial.

Sesuai dengan surat Edaran Kementerian PAN & RB No.20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara dengan budaya kerja organisasi BerAKHLAK dan bangga membangun bangsa maka Rumah sakit khusus jiwa Daerah Atma Husada Mahakam menjadikan sebagai Budaya kerja. Kegiatan dalam membangun budaya kerja tersebut yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi kepada seluruh staff RS sekaligus melaksanakan pencanangan di tahun 2022.

Dalam rangka lebih memperkuat Budaya kerja ber AKHLAK tersebut maka dituangkan di dalam Tata Kelola RS (Hospital By Law). Tentunya dengan serangkaian kegiatan dalam mengimplementasikan budaya kerja ber AKHLAK tersebut belum optimal seperti yang diharapkan maka perlu terus menerus dibangun.

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan RSJD Atma Husada Mahakam harus mempunyai standar yang dapat memberikan kepastian mutu. layanan. Penjagaan mutu layanan harus dilakukan terus menerus untuk

diperbaiki dan berkesinambungan. Selain untuk memberikan kepastian mutu layanan maka dalam upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan. Tujuan adanya manajemen SDM di suatu instansi adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu dan memadai terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Perencanaan tenaga kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan adalah upaya pengadaan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah dan kualitasnya yang telah direncanakan serta peningkatan kemampuan atau kompetensi SDM kesehatan sesuai dengan kebutuhan instansi.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa RS harus menyiapkan tenaga Kesehatan secara jumlah dan jenis harus memenuhi ketentuan. Dalam pelaksanaannya pengembangan SDM harus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan. Permasalahan yang terjadi di RS selain jumlah dan jenis yang belum memenuhi maka yang perlu menjadi perhatian adalah Diklat dengan standar 20 jam per orang per tahun.

8. Aksesibilitas yang rendah terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa.

Meningkatnya masalah kesehatan jiwa memberikan dampak terhadap kebutuhan akan pelayanan kesehatan jiwa yang juga semakin meningkat. Jangkauan pelayanan kesehatan jiwa harus dapat mencapai masyarakat yang tinggal di pelosok daerah dan bukan hanya yang berada di kota saja. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa. Upaya ini tidak mungkin bisa dilaksanakan jika pelayanan kesehatan jiwa hanya diberikan oleh pihak RSJD Atma Husada Mahakam saja.

Berdasarkan piramida pemberi pelayanan kesehatan jiwa seharusnya semua pihak terlibat dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa, baik formal dan non formal dan berasal dari instansi pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan jiwa yang memadai yang dapat menjangkau seluruh masyarakat belum dapat dilaksanakan disebabkan oleh jumlah tenaga kesehatan jiwa masih sangat terbatas.

Masalah kesehatan jiwa sering kali bermanifestasi dalam bentuk keluhan fisik, sehingga tidak terdeteksi dan tidak teratasi dengan baik. Pemahaman masyarakat tentang kesehatan jiwa masih kurang dan stigma terhadap gangguan jiwa masih besar, sehingga mereka tidak datang ke pelayanan kesehatan jiwa, tapi banyak yang pergi ke pengobatan tradisional atau pemuka agama.

Penduduk pedesaan (rural) sulit menjangkau fasilitas kesehatan jiwa dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Adanya otonomi daerah yang membuat daerah menjadi penentu kebutuhan masing-masing, menyebabkan masalah

pelayanan kesehatan jiwa belum tentu dianggap sebagai kebutuhan prioritas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka isu strategis yang dirumuskan adalah Rendahnya aksesibilitas terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan jiwa

2.4 Review Terhadap Rencana RKPD

Dari Rencana Kerja yang telah disusun pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi kalimantan Timur telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja rumah sakit. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Disamping itu dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2023 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan RKPD dengan 3 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

TABEL 2.3 (T-C 31)

REVIEW TERHADAP RENCANA KERJA RKPD TAHUN 2025

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Samarinda**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**109.786.872.425**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Samarinda**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**100 %**	**109.786.872.425**	
			Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	**84 Indeks**				**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**84 Indeks**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	443.138.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	443.138.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.058.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	140.058.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303.080.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	303.080.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	70.584.150.337	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100%	70.584.150.337	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	430 Orang/B	70.155.070.337	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima	430 Orang/	70.155.070.337	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ASN		Tunjangan ASN	ulan				Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	253.080.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	176.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	176,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Pegawai (RSJD AHM)	100 %	832.963.050	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Pegawai (RSJD AHM)	100 %	832.963.050	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	832.963.050	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	832.963.050	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	109 Dokumen	1.717.930.994	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	109 Dokumen	1.717.930.994	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	36.606.722	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Paket	36.6060.722	
	Penyediaan Peralatan dan	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan	9 Paket	120.178.412	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan	9 Paket	120.178.412	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	218.799.260	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	218.799.260	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan	1 Paket	35.346.600				1 Paket	35.346.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	1.307.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161Laporan	1.307.000000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100 %	7.487.327.495	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100 %	7.487.327.495	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	5.323.048.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	5.323.048.000	
	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	367.650.887	Pengadaan Mebel	Samarinda	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	367.650.887	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	1.796.628.608	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	1.796.628.608	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap	78,4 %	5.156.354.050	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap	78,4 %	5.156.354.050	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah		kenyamanan ditempat kerja					kenyamanan ditempat kerja			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.794.374.050	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	1.794.374.050	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.354.480.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	3.354.480.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Samarinda	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	565.008.499	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Samarinda	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72,21 %	565.008.499	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.319.999	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.319.999	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	522.688.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	26 Unit	522.688.500	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Lapangan		dan Perizinannya			
	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD	100 %	23,000,000,000	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD	100 %	23,000,000,000	
	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	23,000,000,000	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	23,000,000,000	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Samarinda	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)**	**93,78%**	**4.210.876.575**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	Samarinda	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)**	**93,78%**	**4.210.876.575**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	95 %	3.453.797.055	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	95 %	3.453.797.055	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	148.964.000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	148.964.000	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	485.359.080	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	485.359.080	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 unit	1.896.366.725	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 unit	1.896.366.725	
	Pengadaan barang penunjang operasional Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2.410 Unit	617.383.250	Pengadaan barang penunjang operasional Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2.410 Unit	617.383.250	
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	182.172.300	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	182.172.300	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	123.551.700	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	123.551.700	
	Penyediaan Layanan	Samarinda	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28.950	750.838.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP	Samarinda	Angka Kunjungan Rawat Jalan	28.950	750.838.000	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12
	Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Orang		Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			Orang		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	750.838.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	750.838.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Samarinda	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	6.241.520	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Samarinda	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	6.241.520	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	6.241.520	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	6.241.520	
1	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Samarinda**	**Persentase SDM Kesehataan Yang Ditingkatkan Kompetensinnya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**93%**	**1.453.016.000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Samarinda**	**Persentase SDM Kesehataan Yang Ditingkatkan Kompetensinnya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**93%**	**1.453.016.000**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah laporan Diklat dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan	**1.453.016.000**	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Jumlah laporan Diklat dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	57 Laporan	**1.453.016.000**	
	Peningkatan Kompetensi dan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia	430 Orang	1.453.016.000	Peningkatan Kompetensi dan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia	430 Orang	**1.453.016.000**	

No	Rencana Kerja RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan dana (Rp.000)**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	12
	Kualifikasi SDM Kesehatan		Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			Kualifikasi SDM Kesehatan		Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			
TOTAL					**Rp.115.450.765.000**	**TOTAL**				**Rp.115.450.765.000**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanankan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Revisi RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2024-2026. Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara pembangunan jangka panjang dan menengah daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, RSJD Atma Husada Mahakam dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan jiwa.

Sesuai dengan isu-isu strategis yang di dapat pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu disusun langkah-langkah berupa program dan kegiatan yang dapat membantu mengatasi semua permasalahan atau isu-isu yang ada. Selain dengan menginventarisir semua kebutuhan yang diperlukan dari pemangku kepentingan guna mengatasi permasalahan yang timbul, RSJD Atma Husada Mahakam juga menampung aspirasi atau keluhan dari masyarakat pengunjung rumah sakit sebagai bahan masukan untuk rencana program dan kegiatan.

Tabel 2.4 (T-C 32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi KalimantanTimur

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kenerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	7
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Samarinda**	**Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan**	**84 Indeks**	
			Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	**100%**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Samarinda	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100%	
	Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Penyediaan gaji dan pelaksanaan penatausahaan keuangan tepat waktu	100 %	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	430 Orang/Bulan	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Samarinda	Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Pegawai (RSJD AHM)	100 %	
	Pengadaan Pakaian Dinis Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Samarinda	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	171 Dokumen	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	13 Paket	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kenerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Bangunan Kantor		Bangunan Kantor yang Disediakan		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	13 Paket	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Samarinda	Persentase Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	100%	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disedia	12 Unit	
	Pengadaan Mabel	Samarinda	Jumlah Paket Mabel Yang Disediakan	9 Paket	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	432 Unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Samarinda	Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	78,4 %	
	Penyedian Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase BMD pada RSJD AHM yang berfungsi dengan baik	72,21 %	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kenerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	
	Peningkatan pelayanan BLUD	Samarinda	Persentase pendapatan terhadap target	100%	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Samarinda	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Samarinda**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)**	**93,78%**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Samarinda	Nilai Aspak	95 %	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Samarinda	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	10 Unit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	1 Unit	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	37 Unit	
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Samarinda	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2410 Unit	
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Samarinda	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	305 Unit	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Samarinda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah	Samarinda	Angka kunjungan rawat jalan	28.950 Orang	

No.	Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kenerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Provinsi				
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	4 Dokumen	
	Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara terintegrasi	Samarinda	Persentase jumlah modul system informasi yang terintegrasi	100%	
	Pengelolaan system informasi kesehatan	Samarinda	Jumlah dokumen hasil pengelolaan system informasi kesehatan	4 Dokumen	
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Samarinda**	**Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**93 %**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	Samarinda	Jumlah laporan diklat dan atau penelitian yang dilaksanakan	57 Laporan	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Samarinda	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	430 Orang	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik lndonesia

Menurut UU No. 18 tahun 2014, upaya kuratif merupakan kegiatan pemberian pelayan kesehatan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mencakup proses diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga ODGJ dapat berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencegah atau mengendalikan disabilitas, memulihkan fungsi sosial, memulihkan fungsi operasional, serta mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar mandiri di masyarakat.

Dalam melakukan upaya kuratif dan rehabilitatif, Kementerian Kesehatan menyasar pada kemudahan akses agar masyarakat tidak

hanya bisa ditangani di rumah sakit, tetapi juga di puskesmas. Dr. Fidiansjah menyatakan untuk saat ini, sudah ada beberapa daerah yang memiliki psikolog klinis di puskesmas. Untuk mengatasi ketimpangan jumlah psikolog klinis yang terdapat di tiap daerah, Kemenkes berupaya melakukan pendelegasian wewenang kepada dokter dan tenaga perawat untuk melakukan pertolongan pertama kepada ODGJ. Dokter dan tenaga perawat diberikan sebuah workshop agar ilmu dari tenaga profesi rumah sakit jiwa dapat tersalurkan, mampu untuk menangani masalah kejiwaan, dan mempercepat proses intervensi sebelum terlambat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005-2025 adalah :

1. pembangunan nasional berwawasan kesehatan.
2. pemberdayaan masyarakat dan daerah.
3. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan.
4. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
5. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Permasalahan kesehatan jiwa sangat besar dan menimbulkan beban kesehatan yang signifikan. Data dari Riskesdas tahun 2013, prevalensi gangguan mental emosional (gejala-gejala depresi dan ansietas), sebesar 6% untuk usia 15 tahun ke atas. Hal ini berarti lebih dari 14 juta jiwa menderita gangguan mental emosional di Indonesia. Sedangkan untuk gangguan jiwa berat seperti gangguan psikosis, prevalensinya adalah 1,7 per 1000 penduduk. Ini berarti lebih dari 400.000 orang menderita gangguan jiwa berat (psikotis). Angka pemasungan pada orang dengan gangguan jiwa berat sebesar 14,3% atau sekitar 57.000 kasus gangguan jiwa yang mengalami pemasungan.

Konsep upaya kesehatan mental di Indonesia yaitu kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan mental yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif,

preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Pelaksanaan upaya kesehatan jiwa berdasarkan asas keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, serta non diskriminasi.

Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini semakin perlu diperhatikan. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa 7 dari 1000 Rumah Tangga terdapat anggota keluarga dengan Skizofrenia/Psikosis. Lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun terkena gangguan mental emosional, lebih dari 12 juta orang berusia diatas 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Kondisi ini telah menyerap dana BPJS Kesehatan sebesar 730 miliar.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif juga terus dilakukan. Keempat upaya tersebut harus memerhatikan 4 aspek yaitu fisik, mental, sosial dan spiritual guna mencapai individu sehat jiwa.

Berdasarkan hasil Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) tahun 2018, Indonesia memiliki prevalensi rumah tangga dengan gangguan jiwa skizofrenia atau psikosis sebesar 7 per 1.000, artinya setiap 1000 penduduk Indonesia, terdapat 7 kasus penderita skizofrenia. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2013 yang berkisar di angka 1,7 per 1.000. Selain itu, prevalensi gangguan emosional pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun pada tahun 2018 mencapai 9,8%, angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2013 yang sebelumnya sebesar 6%. Peningkatan masalah kesehatan jiwa ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Upaya bersama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Sebagai langkah awal untuk mengatasi masalah kesehatan jiwa, pemerintah telah melakukan revisi terhadap UU No. 18 Tahun 2014

yang dijadikan sebagai landasan utama mengenai aturan kesehatan jiwa di Indonesia. Pada pasal satu dijelaskan bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. UU No. 18 Tahun 2014 ditujukan untuk menjamin setiap orang agar dapat mencapai kualitas hidup yang baik, serta memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Upaya promotif dan preventif termasuk dalam upaya pencegahan. Sedangkan upaya pengobatan, berupa upaya kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2014, upaya promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau rangkaian kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat promosi kesehatan jiwa. Upaya promotif bertujuan agar kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan jiwa dapat meningkat. Sedangkan upaya preventif merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. Menurut Riskesdas tahun 2018, dari total penduduk berumur lebih dari 15 tahun yang mengalami depresi, hanya 9% yang melakukan pengobatan. Stigma atau anggapan negatif menjadi salah satu alasan masyarakat Indonesia enggan berkonsultasi ke psikolog/psikiater.

Sejak tahun 2016 lalu, pemerintah mulai menjadikan tindakan preventif sebagai fokus utamanya. Pemerintah bersama dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mulai memberikan edukasi mengenai cara menjadi ibu hamil yang tangguh, baik secara fisik maupun emosional sang ibu selama mengandung. Tidak hanya itu, disediakan pula konseling pra-nikah, edukasi parenting, hingga penyuluhan program yang berfokus kepada sekolah. Program yang berfokus pada sekolah dilakukan melalui guru konseling atau BK, umumnya konselin

tersebut mengenai tindakan perundungan (bullying), seksual, dan sebagainya yang dilaporkan dengan rapor kesehatan.

Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam untuk tahun 2024 - 2026 disusun untuk mendukung pencapaian upaya pelayanan dibidang kesehatan, terutama dibidang kesehatan jiwa dan napza. Kebijakan nasional yang telah dirumuskan tersebut kemudian menjadi acuan untuk perumusan kebijakan pemerinatah Provinsi Kalimatan Timur dan akhirnya manjadi pedoman pula dalam penentuan kebijakan SKPD kesehatan. Pada RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur kebijakan yang di ambil adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Diklat bagi SDM sesuai kompetensinya
2. Memfasilitasi peningkatan, pemeliharaan dan pemerataan jumlah sarana dan prasarana yang standar.
3. Memfasilitasi ketersediaan SOP dan pelaksanaanya.
4. Memfasilitasi tersedianya fasilitas administrasi perkantoran.
5. Memfasilitasi upaya pelayanan kesehatan jiwa di masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merupakan Rumah Sakit khusus kelas A, tetapi belum menjadi Rumah Sakit pendidikan, meskipun saat ini Rumah sakit Jiwa Daerah atma Husada Mahakam sudah melayani mahasiswa institusi pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan:

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis RSJD Atma Husada Mahakam berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK

Sasaaran 1 : Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel

Tujuan 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Napza terpadu

Sasaran 3 : Optimalnya Kualitas pelaksanaaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSJD ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan Rencana Kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur berpedoman pada Renstra RSJD Atma Husada Mahakam Prov. Kaltim. Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan telah sesuai dengan RKPD dengan 3 nomenklatur program yaitu: Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

4.1.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, maka Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur merumuskan Tujuan:

1. Mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel serta berorientasi pelayanan publik yang didukung ASN BerAKHLAK
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran strategis RSJD Atma Husada Mahakam berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Sasaaran 1 : Terwujudnya Manajemen Rumah sakit yang transparan dan akuntabel

Sasaran 2 : Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan jiwa dan Napza terpadu

Sasaran 3 : Optimalnya Kualitas pelaksanaaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian

Dengan adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi RSJD Atma Husada Mahakam jika dikaitkan dengan tujuan RSJD Atma Husada Mahakam yang berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan Napza yang berkualitas untuk mendukung dan ikut serta dalam pembangunan sumber daya menusia yang berdaya saing sesuai dengan misi pemerintah daerah dapat menemui kendala. Karena untuk menciptakan manusia yang memiliki daya saing tidak cukup hanya memiliki kesehatan fisik saja tetapi juga dibutuhkan kesehatan mental yang optimal.

Dalam rangka memperbaiki kemaslahatan umat manusia PBB telah mencanangkan *Sustainable Development Goals (SDG)* yang mencakup 17 bidang target yang diupayakan tercapai pada tahun 2030 mendatang. Salah satu bidang dari SDG yang menjadi sorotan adalah bidang kesehatan, karena

akan berdampak langsung pada kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan manusia 12 tahun ke depan yaitu pada tahun 2030.

Salah satu target yang tercantum dalam Sustainable Development Goals (SDGs), namun sering terabaikan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat setidaknya satu dari empat orang di dunia pernah mengalami masalah kejiwaan sepanjang hidupnya. Sedang di Indonesia menurut Survei Global Health data tahun 2017 menunjukan ada 27,3 juta orang di indonesia yang mengalami masalah kejiwaan, Hal ini berarti setidaknya ada satu dari sepuluh orang di negara ini sedang mengalami masalah kejiwaan. Membuat Indonesia menjadi negara dengan pengidap gangguan jiwa tertinggi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi salah satu negara dengan pencegahan dan penanganan gangguan jiwa yang terburuk. diperlukan sinergitas yang baik antara Pemerintah dan Masyarakat dalam menyikapi permasalahan ini.

RSJD Atma Husada Mahakam melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang pelayanan Kesehatan jiwa dannarkotika, psikotropika. Serta zat adiktif lainnya (NAPZA) yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan sebagai OPD. Analisis Kinerja Pelayanan OPD tersebut merujuk pada **IKK (Indikator Kinerja Kunci)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Secara Nasional RSJD Atma Husada Mahakam memiliki **SPM/Standar Nasional** mutu pelayanan rumah sakit yang harus dipenuhi yang teediri dari 17 Pelayanan penilaian dimana indikator tersebut merupakan indikator program RSJD Atma Husada Mahakam.

4.1.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan adalah 3 (Tiga) program, 11 (Sembilan) kegiatan, dan 27 (Dua Puluh Lima) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

   Dengan kegiatannya yaitu:

   a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat, melaui sub kegiatannya:

      - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan yaitu :

   a. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan :

      1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

   b. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, melalui sub kegiatan :

      1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
      2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
      3) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
      4) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
      5) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

6) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, Melalui Sub Kegiatan :
   - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja, melalui sub kegiatan :
      1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
      1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan :
      1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
      2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
      3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan, melalui sub kegiatan :
      1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui sub kegiatan:
   1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, melalui sub kegiatan:
   1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   2) Pengadaan Mabel
   3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
g. Peningkatan pelayanan BLUD, melalui sub kegiatan:
   - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada RSJD Atma Husada Mahakam sebagian besar dilaksanakan di Samarinda, kecuali beberapa kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia direncanakan dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur. RSJD Atma Husada Mahkam berkomitmen memerikan pelayanan kepada masyarakat secara luas, tidak membatasi dari golongan mana saja, sehingga kelompok sasaran untuk program, kegaitan dan sub kegaitan RSJD Atma Husada Mahakam adalah konsumen dan karyawan RSJD Atma Husada Mahakam.

Kebutuhan dana / pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah **Rp. 115.450.765.000** yang bersumber dari APBD dan BLUD Provinsi Kalimantan Timur.

4.1.3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Secara umum program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 telah selaras dengan RKPD Provinsi Kalimantan Tmur tahun 2025, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.5. (T-C 33) yaitu review terhadap RKPD dengan analisis kebutuhan RSJD Atma Husada Mahakam telah sesuai.

Tabel 2.5 (T-C 33)

Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah : RSJD Atma Husada Mahakam

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti**	**Samarinda**	**100 %**	**109.786.872.425**	**APBD**		**100 %**	**86.042.855.759**
							Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		**84 Indeks**		**APBD**		**86 Indeks**	**100,000,000**
1	**02**	**01**	1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Samarinda	100 %	443.138.000	**APBD**		100 %	152.600.000
1	**02**	**01**	1	01	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda	5 Dokumen	140.058.000	**APBD**		5 Dokumen	58,800,000
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Samarinda	5 Laporan	303.080.000	**APBD**		4 Laporan	93.800.000
1	**02**	**01**	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	Samarinda	100%	70.584.150.337	**APBD**		100 %	41,761,790,209
1	**02**	**01**	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	430 Orang/Bulan	70.155.070.337	**APBD**		185 Orang/Bulan	41,419,310,209
1	**02**	**01**	1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Samarinda	12 Dokumen	253.080.000	**APBD**		12 Dokumen	22,248,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pelaksanaan Tugas ASN							
1	**02**	**01**	1	02		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	4 Dokumen	176,000,000	**APBD**		4 Dokumen	120.000.000
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pakaian Kerja Pegawai (RSJD AHM)	Samarinda	100 %	832.963.050	**APBD**		100 %	1,397,713,500
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	3 Paket	832.963.050	**APBD**		3 Paket	1,397,713,500
1	**02**	**01**	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	Samarinda	109 Dokumen	1.717.930.994	**APBD**		107 Dokumen	1,014,476,750
1	**02**	**01**	1	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Samarinda	13 Paket	36.606.722	**APBD**		28 Paket	139,700,000
1	**02**	**01**	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Samarinda	9 Paket	120.178.412	**APBD**		21 Paket	237,660,250
1	**02**	**01**	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Samarinda	13 Paket	218.799.260	**APBD**		19 Paket	92.535.500
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan Yang Disediakan	Samarinda	1 Paket	35.346.600	**APBD**		2 Paket	83.250.000
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Samarinda	161 Laporan	1.307.000.000	**APBD**		70 Laporan	462,000,000

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
1	**02**	**01**	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan pengadaan sesuai perencanaan	Samarinda	100 %	7.487.327.495	**APBD**		100%	438.933.500
1	**02**	**01**	1	07	06	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Samarinda	12 Unit	5.323.048.000	APBD		0 Unit	0
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Samarinda	0	0	APBD		1 Unit	342.000.000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Samarinda	9 Paket	367.650.887	APBD		1 Paket	19.250.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Samarinda	432 Unit	1.796.628.608			10 Unit	77.683.500
1	**02**	**01**	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai survei kepuasan pegawai terhadap kenyamanan ditempat kerja	Samarinda	78,4 %	5.156.354.050	**APBD**		78,4 %	16,857,403,800
1	**02**	**01**	1	08	02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	1 Laporan	7.500.000	APBD		2 Laporan	25,000,000
1	**02**	**01**	1	08		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Samarinda	48 Laporan	1.794.374.050	APBD		48 Laporan	2,041,624,200
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Samarinda	2 Laporan	3.354.480.000	APBD		16 Laporan	14,790,779,600

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Umum Kantor yang Disediakan							
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	Samarinda	72,21 %	565.008.499	**APBD**		77,23 %	554,738,000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Samarinda	1 Unit	42.319.999	APBD		1 Unit	156,376,000
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Samarinda	26 Unit	522.688.500	APBD		35 Unit	363.562.000
1	**02**	**01**	1	10		Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase pendapatan hasil pelayanan terhadap target BLUD	Samarinda	100 %	23,000,000,000	**APBD**		100 %	23,000,000,000
1	**02**	**01**	1	10	01	Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Samarinda	15 Unit Kerja	23,000,000,000	APBD		15 Unit Kerja	23,000,000,000
1	**02**	**02**				**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)**	**Samarinda**	**93,78%**	**4.210.876.575**	APBD		93,83 %	73.943.091.241
1	**02**	**02**	1	01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	Samarinda	95 %	3.453.797.055	APBD		95,2 %	72.976.115.755
1	**02**	**02**	1	01	10	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Samarinda	10 Unit	148.964.000	APBD		3 Unit	69.982.573.320

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**02**	**02**	1	01	17	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Samarinda	1 Unit	485.359.080	APBD		2 Unit	307,544,400
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Samarinda	37 unit	1.896.366.725	APBD		1 Unit	1.204.875.000
						Pengadaan barang penunjang operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Samarinda	2.410 Unit	617.383.250	APBD		1725 Unit	537.075.000
						Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Samarinda	305 Unit	182.172.300	APBD		345 Unit	198,061,200
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Samarinda	3 Paket	123.551.700	APBD		25 Paket	745.986.835
1	**02**	**02**	1	02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	Samarinda	28.950 Orang	750.838.000	APBD		31.845 Orang	670.330.996
1	**02**	**02**	1	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	Samarinda	4 Dokumen	750.838.000	APBD		5 Dokumen	670.330.996

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(ODMK)							
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	Samarinda	100 %	6.241.520	APBD		100 %	296.644.490
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Samarinda	4 Dokumen	6.241.520	APBD		4 Dokumen	296.644.490
1	**02**	**03**				**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**Persentase SDM Kesehataan Yang Ditingkatkan Kompetensinnya (RSJD Atma Husada Mahakam)**	**Samarinda**	**93%**	**1.453.016.000**	**APBD**		**93,5 %**	**2.292.240.000**
1	**02**	**03**	**1**	**02**		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan Diklat dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	Samarinda	57 Laporan	**1.453.016.000**	**APBD**		85 Laporan	2.292.240.000
1	**02**	**03**	**1**	**02**	**01**	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi SDM Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Samarinda	430 Orang	**1.453.016.000**	APBD		284 Orang	2.292.240.000
TOTAL RENCANA KERJA RENJA APBD DAN BLUD									**Rp.115.450.765.000**			**TOTAL**	**162.378.187.000**	

BAB V
PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja 2025

Dalam pelakasanaan penyusunan serta penetepan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasarn pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 harus menerangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparan, dan akuntabilitas.

Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai oleh rumah sakit sebagai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan dibidang kesehatan.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sesuai dengan terbitnya Permendagri 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sehingga didalam penyusunan Rencana Kerja RSJD Atma Husada Mahakam tahun 2025 harus menyesuaikan Permendagri

Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah Daerah.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Diharapkan ke depan Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam mampu mengatasi kendala-kendala yang timbul di dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa, baik berbagai kendala intern rumah sakit maupun kendala yang dirasakan masyarakat sebagai konsumen layanan kesehatan jiwa, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan RSJD Atma Husada Mahakam antara lain :

a. Meminimalisir stigma masyarakat terhadap ODMK melalui upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, misalnya dengan pelaksanaan kegiatan home visite, FGD, sosialisasi melalui media elektronik maupun media social terkait pandangan positif terhadap RSJD AHM secara umum maupun ODMK secara khusus.
b. Memaksimalkan pemanfaaan teknologi dan informasi dengan membangun beberapa system untuk lebih efisien dan efektinya proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga dilakukan pelatihan dan bimbingan terhadap SDM Rumah Sakit yang memerlukan pendampingan terkait teknologi dan informasi.
c. Telah dilakukan perombakan terhadap SOTK RSJD Atma Husada Mahakam sesuai dengan kebutuhan organisasi, hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya Pergub Kaltim No. 22 Tahun 2023 Tentang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Pada Dinas Kesehatan. Berdasarkan hal itu RSJD AHM sedang melakukan program relokasi Rumah sakit kelahan yang baru agar dapat memaksimalkan dan melaksanakan pengembangan pelayanan yang baru.

d. Pemenuhan terkait kuantitas dan kualitas SDM Rumah sakit melalui usulan SDM ke BKD Provinsi Kaltim sesuai anjab RSJD AHM serta memotivasi dan mengikut sertakan SDM untuk mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi secara langsung maupun secara online sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit.
e. RSJD Atma Husada Mahakam saat ini adalah sebagai Rumah Sakit pengampuh untuk pelayanan kesehatan jiwa bagi beberapa Rumah Sakit daerah yang ada di Provinsi Kaimantan Timur. Hal ini merupakan upaya dalam rangka meningkatkan aksesbilitas pelayanan kesehatan jiwa bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah lain sekitarnya.

Semoga Rencana Kerja (Renja) RSJD Atma Husada Mahakam ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009